

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUNG HIJAU DI DESA CIKOLE KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Wawan Syahrudin ¹, Agustina Setiawan, ², Dadan Kurnia ³

ABSTRACT

This article examines the influence of community participation on the implementation of community empowerment within the Green Village Program in Cikole Village, Lembang District, West Bandung Regency. The study is grounded in environmental issues at the village level, particularly the lack of consistent waste sorting practices, limited community awareness, and the absence of a final waste disposal facility in Lembang District. The Green Village Program is positioned as an environmental-based community empowerment initiative that requires active citizen involvement to improve waste management, strengthen local institutions, and create a cleaner, healthier, and more sustainable village environment. This research uses a quantitative approach with an explanatory research design. The population consists of 5,655 households in Cikole Village, and the sample includes 98 respondents determined using the Taro Yamane formula with a 10% margin of error. Data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed through descriptive statistics and simple linear regression. The analysis applies Plummer's community participation factors, including knowledge and skills, occupation, education level, gender, and cultural beliefs. Community empowerment is analyzed using Mardikanto and Soebianto's empowerment strategy, consisting of human resource development, institutional development, community capital accumulation, productive business development, and the provision of appropriate information. The findings show that community participation is categorized as fairly good with an achievement score of 62.65%, while the implementation of community empowerment is also categorized as fairly good with an achievement score of 65.19%. The regression test shows that community participation has a positive and significant influence on community empowerment, indicated by a t-value of 23.564, which is higher than the t-table value of 1.66088, and a p-value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination reaches 0.853, meaning that 85.3% of the variation in community empowerment can be explained by community participation, while the remaining 14.7% is influenced by other factors. This article concludes that active community participation is a dominant factor in strengthening the effectiveness and sustainability of the Green Village Program in Cikole Village.

Keywords: community participation, community empowerment, Green Village Program, waste management, Cikole Village.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pembangunan desa pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perkembangan saat ini, pembangunan desa tidak lagi cukup dipahami sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menyentuh dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kapasitas masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai tiga pilar utama yang harus berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki posisi penting dalam menggerakkan pembangunan berbasis partisipasi dan pemberdayaan.

Salah satu isu penting dalam pembangunan desa adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah telah menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan. Tim *Green Development* (2019) menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup pada beberapa dekade mendatang, salah satunya ditandai oleh penyusutan kawasan hutan primer dan meningkatnya kerusakan lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi kebijakan dan gerakan masyarakat yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan dari tingkat lokal.

Program Kampung Hijau menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pembangunan berbasis lingkungan. Pramudito (2014) menjelaskan bahwa Kampung Hijau merupakan gerakan penghijauan, penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kenyamanan lingkungan, dan pengolahan sampah secara mandiri. Kampung Hijau tidak hanya bermakna kampung yang dipenuhi tanaman, tetapi juga mencerminkan tekad masyarakat untuk kembali pada prinsip pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, lestari, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kampung Hijau membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat sebagai aktor utama.

Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi alam, wisata, pertanian, dan perkebunan. Desa ini berada di kawasan yang memiliki daya tarik wisata alam dan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup dinamis. Namun, potensi tersebut berhadapan dengan persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam tesis dijelaskan bahwa masyarakat Desa Cikole masih belum sepenuhnya konsisten dalam memilah sampah organik dan nonorganik. Sampah masih sering dibuang tanpa pemilahan, bahkan sungai masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini semakin kompleks karena Kecamatan Lembang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir, sehingga pengelolaan sampah sangat bergantung pada fasilitas penampungan di wilayah lain.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program Kampung Hijau sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa partisipasi merupakan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, baik melalui pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam konteks Kampung Hijau, partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama karena pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat harus menjadi subjek yang ikut merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan mengevaluasi kegiatan lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Hijau juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kualitas hidupnya. Dalam Program Kampung Hijau, pemberdayaan diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kelembagaan, modal sosial, usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna. Namun, pelaksanaan pemberdayaan di Desa Cikole belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan rendahnya keterampilan pengelolaan sampah, lemahnya

kelembagaan kelompok, terbatasnya modal, belum optimalnya usaha produktif berbasis sampah, serta kurangnya sosialisasi berkelanjutan.

Plummer dalam Yulianti (2012) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan dan keahlian, pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta kepercayaan terhadap budaya tertentu. Faktor-faktor tersebut relevan untuk membaca kondisi Desa Cikole, karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh pemahaman warga, waktu luang, pendidikan, pembagian peran laki-laki dan perempuan, serta kebiasaan budaya seperti membakar atau membuang sampah secara turun-temurun. Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

b. Kerangka Teoretis

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan peran serta seseorang atau kelompok dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun materi. Sementara itu, Alastaire White dalam Sunarti (2003) memandang partisipasi sebagai keterlibatan komunitas lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran fisik dalam kegiatan, tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program.

Teori utama partisipasi yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada Plummer dalam Yulianti (2012), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu. Kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana

masyarakat Desa Cikole memiliki kemampuan, kesempatan, dan kemauan untuk terlibat dalam Program Kampung Hijau. Dalam program berbasis lingkungan, pengetahuan mengenai pemilahan sampah, waktu luang, tingkat pendidikan, pembagian peran sosial, dan kebiasaan budaya menjadi unsur penting yang menentukan kualitas partisipasi.

Konsep pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menilai pelaksanaan Program Kampung Hijau. Mardikanto dan Soebianto (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian. Strategi pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2017) meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna. Kelima dimensi ini menjadi dasar analisis variabel pemberdayaan masyarakat dalam artikel ini. Dengan kerangka tersebut, partisipasi masyarakat diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan dalam Program Kampung Hijau.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam artikel ini, variabel independen adalah partisipasi masyarakat, sedangkan variabel dependen adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau di Desa Cikole.

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan instrumen kuesioner tertutup berbasis skala *Likert*. Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di Desa Cikole dan tercatat dalam data kependudukan tahun 2023 sebanyak 5.655 KK. Sampel ditentukan dengan teknik *Simple Random Sampling*. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa *Simple Random Sampling*

merupakan teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Taro Yamane dalam Riduwan (2006), yaitu:

$$n = N / (N.d^2 + 1)$$

Dengan keterangan: n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi, dan d^2 adalah tingkat presisi atau kesalahan yang ditetapkan. Dengan populasi 5.655 KK dan presisi 10%, diperoleh sampel sebanyak 98 responden.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Narimawati (2010) digunakan untuk menghitung persentase skor tanggapan responden melalui rumus:

$$\text{Skor Total (\%)} = \text{Skor Aktual} / \text{Skor Ideal} \times 100\%$$

Adapun analisis regresi linear sederhana digunakan dengan persamaan:

$$Y = a + \beta X$$

Persamaan tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

2. PEMBAHASAN

a. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kampung Hijau

Pelaksanaan Program Kampung Hijau di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan sangat bergantung pada tingkat partisipasi warga. Program ini tidak dapat berjalan hanya melalui instruksi pemerintah desa atau penyediaan fasilitas lingkungan semata. Lebih dari itu, keberhasilan Program Kampung Hijau

ditentukan oleh sejauh mana masyarakat bersedia terlibat, memahami tujuan program, melaksanakan kegiatan, memelihara hasil, dan menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari perilaku sehari-hari.

Secara konseptual, partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dianalisis melalui faktor-faktor yang dikemukakan Plummer dalam Yulianti (2012), yaitu pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, serta kepercayaan terhadap budaya tertentu. Kelima faktor tersebut menjadi dasar untuk membaca kualitas keterlibatan masyarakat Desa Cikole dalam Program Kampung Hijau. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dianalisis melalui strategi Mardikanto dan Soebianto (2017), yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna. Dengan demikian, hubungan antara partisipasi dan pemberdayaan tidak hanya dilihat sebagai hubungan statistik, tetapi juga sebagai hubungan sosial yang menentukan keberhasilan program berbasis lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Cikole berada pada kategori cukup baik dengan capaian sebesar 62,65%. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki keterlibatan dalam Program Kampung Hijau, tetapi keterlibatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi pengetahuan dan keahlian, capaian sebesar 58,50% menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memahami dasar-dasar pengelolaan lingkungan, tetapi masih membutuhkan peningkatan keterampilan teknis, terutama dalam memilah sampah organik dan nonorganik, mengolah sampah rumah tangga, serta memanfaatkan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi.

Dimensi pekerjaan masyarakat memperoleh capaian paling rendah, yaitu 58,16%. Temuan ini penting karena jenis pekerjaan dan kesibukan warga berpengaruh terhadap ketersediaan waktu untuk mengikuti kegiatan lingkungan. Sebagian masyarakat Desa Cikole bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, jasa, dan pekerjaan informal lain yang menuntut waktu cukup besar. Akibatnya, kehadiran dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, kerja bakti, atau

pengelolaan sampah belum selalu konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemauan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur waktu dan beban ekonomi warga.

Pada dimensi tingkat pendidikan, capaian sebesar 64,96% menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat cukup mendukung pemahaman terhadap program. Tingkat pendidikan yang relatif memadai menjadi modal sosial penting dalam menerima informasi, memahami manfaat pengelolaan lingkungan, dan menerapkan prinsip Kampung Hijau. Namun, capaian tersebut belum masuk kategori baik, sehingga literasi lingkungan masih perlu diperkuat melalui edukasi yang lebih praktis, sederhana, dan berkelanjutan.

Dimensi jenis kelamin memperoleh capaian tertinggi, yaitu 66,19%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam Program Kampung Hijau relatif terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat dalam kegiatan fisik seperti kerja bakti, penataan lingkungan, dan pembangunan sarana. Namun, keterlibatan berbasis gender ini masih perlu diintegrasikan agar tidak berjalan secara terpisah. Program Kampung Hijau akan lebih kuat apabila peran laki-laki dan perempuan dikembangkan secara saling melengkapi.

Dimensi kepercayaan budaya memperoleh capaian 65,44%. Nilai ini menunjukkan bahwa budaya lokal secara umum cukup mendukung pelaksanaan Program Kampung Hijau, terutama melalui semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Namun, masih terdapat kebiasaan lama yang perlu diubah, seperti membuang sampah tanpa pemilahan atau membakar sampah karena dianggap lebih praktis. Dalam hal ini, perubahan perilaku membutuhkan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga kultural. Edukasi lingkungan harus disampaikan dengan mempertimbangkan kebiasaan, nilai lokal, dan cara berpikir masyarakat.

Sementara itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau berada pada kategori cukup baik dengan capaian sebesar 65,19%.

Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan memperoleh capaian 65,17%, yang berarti kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran lingkungan telah memberikan dampak cukup positif. Akan tetapi, materi dan frekuensi pembinaan masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya kebersihan, tetapi juga mampu menerapkan teknik pengelolaan sampah secara mandiri.

Pada dimensi pengembangan kelembagaan kelompok, capaian sebesar 65,03% menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dalam Program Kampung Hijau sudah mulai berfungsi, tetapi belum kuat. Kelompok pengelola lingkungan, bank sampah, atau kelembagaan warga perlu memiliki struktur kerja, pembagian tugas, administrasi, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Tanpa kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat mudah bersifat musiman dan bergantung pada dorongan tokoh tertentu.

Dimensi pemupukan modal masyarakat memperoleh capaian 64,62%, menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Program Kampung Hijau membutuhkan dukungan dana untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah, alat pemilahan, wadah kompos, pelatihan, dan pengembangan usaha berbasis daur ulang. Keterbatasan modal menyebabkan program sulit berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan lingkungan seharusnya tidak berhenti pada penyadaran, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan nilai ekonomi agar masyarakat memiliki insentif untuk terus terlibat.

Pada dimensi pengembangan usaha produktif, capaian sebesar 65,51% menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari Program Kampung Hijau sudah mulai terlihat. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah nonorganik dapat dikembangkan menjadi produk daur ulang. Namun, usaha produktif tersebut belum sepenuhnya berkembang karena masih terbatas pada skala kecil, belum memiliki pasar yang luas, dan belum semua warga terlibat. Oleh karena itu, pengembangan usaha produktif perlu diperkuat melalui pelatihan

kewirausahaan, pendampingan pemasaran, kerja sama dengan BUMDes, serta dukungan pihak swasta.

Dimensi penyediaan informasi tepat guna memperoleh capaian tertinggi dalam variabel pemberdayaan, yaitu 65,64%. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai Program Kampung Hijau telah tersedia dan cukup diterima masyarakat. Namun, informasi tersebut perlu disampaikan secara lebih menarik, berulang, dan mudah dipahami. Informasi yang baik tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan masyarakat, tetapi juga mengapa kegiatan itu penting, bagaimana cara melakukannya, dan manfaat apa yang dapat diperoleh warga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan, waktu, pendidikan, kesadaran gender, dan dukungan budaya yang memadai, maka strategi pemberdayaan lebih mudah dijalankan. Sebaliknya, ketika partisipasi masih rendah, maka pelatihan, kelembagaan, modal, usaha produktif, dan penyediaan informasi tidak akan menghasilkan dampak yang kuat. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya pelengkap program, tetapi merupakan prasyarat utama keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.

b. Besaran Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Besaran pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau dapat dilihat dari hasil analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui nilai t hitung sebesar 23,564, lebih besar daripada t tabel 1,66088, serta nilai p -value $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis alternatif diterima, yaitu terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik pula pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pengaruh positif ini dapat dipahami karena Program Kampung Hijau merupakan program yang sangat bergantung pada keterlibatan warga. Pemerintah desa atau pengelola program dapat menyusun aturan, menyediakan fasilitas, dan melakukan sosialisasi, tetapi perubahan perilaku lingkungan hanya akan terjadi apabila masyarakat bersedia terlibat secara aktif. Dalam konteks ini, partisipasi menjadi energi sosial yang menggerakkan pemberdayaan.

Besarnya pengaruh juga terlihat dari nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,853. Angka ini menunjukkan bahwa 85,3% variasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh partisipasi masyarakat, sedangkan 14,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini. Nilai tersebut tergolong sangat kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor dominan dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau.

Secara substantif, angka 85,3% menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan di Desa Cikole sangat ditentukan oleh kualitas keterlibatan masyarakat. Apabila masyarakat aktif mengikuti pelatihan, memilah sampah, menjaga lingkungan, bergabung dalam kelompok pengelola, menyampaikan gagasan, serta memanfaatkan informasi yang diberikan, maka pemberdayaan akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, apabila masyarakat pasif, maka program cenderung berhenti sebagai kegiatan administratif atau seremonial.

Namun, capaian partisipasi masyarakat yang masih berada pada kategori cukup baik menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar untuk perbaikan. Besarnya pengaruh partisipasi tidak boleh dimaknai bahwa kondisi partisipasi sudah ideal. Justru, karena pengaruhnya sangat besar, peningkatan partisipasi menjadi agenda paling strategis untuk memperkuat Program Kampung Hijau. Perbaikan pada dimensi pekerjaan masyarakat, pengetahuan teknis, dan kebiasaan budaya dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemberdayaan.

Faktor lain sebesar 14,7% juga perlu diperhatikan. Faktor tersebut dapat berupa dukungan anggaran, kepemimpinan pemerintah desa, kualitas pendamping, sarana-prasarana, dukungan pihak swasta, regulasi desa, serta keberlanjutan kelembagaan. Artinya, meskipun partisipasi masyarakat sangat dominan, keberhasilan Program Kampung Hijau tetap membutuhkan dukungan ekosistem yang memadai. Partisipasi yang tinggi akan lebih efektif apabila ditopang oleh fasilitas yang cukup, kelembagaan yang kuat, dan dukungan kebijakan yang konsisten.

Dengan demikian, besarnya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan menunjukkan bahwa Program Kampung Hijau harus terus diarahkan sebagai gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah desa. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan penguat kelembagaan, sementara masyarakat menjadi aktor yang menjalankan perubahan perilaku lingkungan di tingkat rumah tangga dan komunitas. Apabila pola ini diperkuat, Program Kampung Hijau di Desa Cikole berpeluang berkembang menjadi model pemberdayaan lingkungan yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program berbasis lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, fasilitas, atau arahan pemerintah desa, tetapi sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, waktu, kesadaran, dukungan pendidikan, serta nilai budaya yang mendukung akan lebih mudah terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah, pengelolaan lingkungan, pengembangan kelembagaan, dan usaha produktif berbasis lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori cukup baik dengan capaian 62,65%. Artinya, masyarakat Desa Cikole sudah menunjukkan keterlibatan dalam Program Kampung Hijau, tetapi belum sepenuhnya optimal. Beberapa aspek masih perlu diperkuat, terutama pengetahuan teknis masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan waktu akibat pekerjaan, serta kebiasaan budaya yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Program Kampung Hijau juga berada pada kategori cukup baik dengan capaian 65,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, pemupukan modal, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna telah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan agar lebih berdampak. Kelembagaan lingkungan, usaha produktif berbasis sampah, serta dukungan modal masyarakat masih perlu dikembangkan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara statistik, partisipasi masyarakat terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan nilai t hitung $23,564 > t$ tabel $1,66088$ dan p -value $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi sebesar $0,853$ menunjukkan bahwa $85,3\%$ variasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh partisipasi masyarakat, sedangkan $14,7\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan Program Kampung Hijau di Desa Cikole.

b. Saran

Pemerintah Desa Cikole perlu memperkuat strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi lingkungan yang lebih praktis, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan warga. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi, tetapi perlu diarahkan pada pelatihan teknis

seperti pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengelolaan bank sampah, daur ulang, dan pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.

Kelembagaan Program Kampung Hijau perlu diperkuat agar tidak bergantung pada semangat individu atau kegiatan sesaat. Pemerintah desa bersama masyarakat dapat memperjelas struktur kelompok pengelola, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, sistem pelaporan, serta agenda kegiatan rutin. Dengan kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat dapat lebih terarah dan pelaksanaan pemberdayaan menjadi lebih berkelanjutan.

Program Kampung Hijau juga perlu dikembangkan menjadi gerakan ekonomi lingkungan. Sampah organik dapat diarahkan pada pembuatan kompos untuk mendukung pertanian lokal, sedangkan sampah nonorganik dapat dikembangkan menjadi produk daur ulang melalui kelompok usaha masyarakat. Untuk itu, pemerintah desa perlu membuka akses kerja sama dengan BUMDes, pelaku usaha, komunitas lingkungan, sekolah, dan pihak swasta agar program tidak hanya menghasilkan lingkungan yang bersih, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi warga.

REFERENSI

- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Narimawati, U. (2010). *Metodologi penelitian: Dasar penyusun penelitian ekonomi*. Jakarta: Genesis.
- Plummer, J. (2000). *Municipalities and community participation: A sourcebook for capacity development*. London: Earthscan.
- Pramudito, S. (2014). Kampung Hijau: Studi perilaku warga di Kampung Gambiran Yogyakarta. Dalam *Proceeding Seminar Nasional: Konsep dan Implementasi Infrastruktur-Bangunan-Konstruksi "Hijau" Mewujudkan Kota Hijau* (hlm. 12–19).
- Riduwan, & Akdon. (2006). *Rumus dan data dalam aplikasi statistika*. Bandung: Alfabeta.

- Solikhah, N., & Fatimah, T. (2020). Kampung hijau pada kampung kota: Studi kasus Kampung Tanjung Gedong RT 05/RW 08, Jakarta Barat. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Partisipasi masyarakat desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yulianti, Y. (2012). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok* [Tesis, Universitas Andalas].

Regulasi dan Dokumen

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Pemerintah Desa Cikole. (2021). *Profil Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*.

